

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Catalonia atau Catalunya dalam bahasa Catalan merupakan salah satu wilayah otonomi di negara Spanyol. Catalunya memiliki luas 32.114 km² yang terdiri dari empat provinsi, yaitu Girona, Lleida, Tarragona, dan Barcelona sebagai ibu kota. Wilayah ini terletak di Semenanjung Iberia atau sudut timur laut Spanyol yang berdekatan dengan Portugal. Bagian utara Catalunya berbatasan langsung dengan Perancis dan Andorra, sebelah timur dengan Laut Mediterania dan bagian hingga selatan berbatasan dengan daerah Spanyol, yaitu Aragon hingga Valencia. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Catalunya adalah Bahasa *Catalan* yang merupakan bahasa resmi, Bahasa Spanyol dan Aranese juga turut digunakan di wilayah ini. Catalunya merupakan wilayah yang sangat potensial dalam bidang industri dan pariwisata terutama bagi Spanyol dikarenakan wilayah ini menyumbangkan ekonomi sebesar 223,6 miliar Euro atau setara dengan US\$ 262,96 miliar (Chandra, 2017).

Catalunya secara garis besar memiliki aspek sejarah, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda dengan pemerintah pusat Spanyol. Sebelum jatuhnya Spanyol ketangan Jenderal Fransisco Franco, Spanyol pernah berusaha untuk memaksakan penggunaan hukum dan Bahasa Spanyol di Catalunya, namun upaya tersebut berhenti karena pemerintah Spanyol kembali membentuk *Generalitat de Catalunya* atau yang dikenal dengan Institusi Otonomi Catalunya. Hingga kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Franco terhadap pemerintahan sah Republik Spanyol pada pertengahan bulan Juli 1936, yang kemudian disusul dengan peristiwa Perang Sipil Spanyol

menyebabkan terjadinya tindakan penindasan terhadap Lembaga politik Catalan, pelarangan penggunaan Bahasa Catalan, dan larangan untuk semua elemen yang bersifat simbolis terkait identitas Catalan seperti bendera hingga lagu kebangsaan. Catalunya mengalami masa kegelapan terburuk pada rezim Jenderal Franco. Para perwakilan dari partai politik demokratis pergi ke pengasingan, dipenjara dan di eksekusi (Preston, *The Spanis holocaust*, 2012).

Keinginan Catalunya untuk menjadi wilayah yang berdaulat direalisasikan pemerintah otonom dan masyarakat Catalunya dengan melakukan referendum kemerdekaan yang dilakukan pada 1 Oktober 2017. Referendum ini menjadi sorotan dunia internasional dan menjadi babak baru adanya kebuntuan pada proses politik bagi pemerintah Spanyol dan Catalunya. Pemerintah Catalunya melakukan referendum bukan tanpa alasan, karena referendum ini menjadi wujud nyata perjuangan Catalunya yang merasa bahwa Pemerintah Spanyol berlaku tidak adil dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Catalunya. Alasan lain yang menjadi penguat Catalunya untuk berdaulat adalah krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2008 yang membuat angka pengangguran dan hutang Spanyol bertambah. Masyarakat Catalunya mempercayai bahwa Madrid merupakan salah satu penyebab krisis ekonomi yang terjadi di tahun tersebut di Spanyol dan hal ini semakin diperkuat dengan Catalunya diharuskan membayar pajak yang lebih tinggi yaitu senilai US\$ 12 miliar, ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Spanyol. Pajak yang diberikan oleh Catalunya tidak sebanding dengan imbalan yang diterima oleh wilayah Catalunya.

Keputusan Pemerintah Madrid yang membatalkan Undang-undang Peradilan Konstitusi 2010 dengan alasan bahwa Catalunya masih bagian dari “warga negara” Spanyol, sehingga Catalunya tidak bisa disebut sebagai negara atau bangsa yang berdaulat turut menjadi

pendukung masyarakat Catalunya untuk menyuarakan kedaulatan. Masyarakat Catalunya mengharapkan kehidupan yang lebih baik dengan aturan pemerintah sendiri tanpa campur tangan dari Madrid. Referendum dan kedaulatan yang diinginkan Catalunya juga didasari politik identitas dan sejarah perjuangan Catalunya yang telah berlangsung sejak tahun 1714, walaupun begitu Pemerintah Spanyol menganggap bahwa tindakan Catalunya adalah pelanggaran konstitusi 1978 yang dalam pasal 2 menyebutkan bahwa "*setiap wilayah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Bangsa Spanyol*" (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 1978). Penyeragaman identitas di Spanyol membuat elit lokal juga melakukan perlawanan dikarenakan secara tidak langsung pemerintah Spanyol juga ingin menghilangkan identitas-identitas lokal baik dari historis, linguistik, dan budaya khas. Masyarakat Catalan diketahui merupakan pemberontak paling tangguh di tanah Spanyol sejak dahulu, mereka menuntut tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan identitas mereka tetapi juga politik, ekonomi, bahkan sepakbola (Wangke, 2017).

Sejarah mencatat perang saudara yang terjadi di Spanyol berlangsung selama 3 tahun, terhitung sejak 17 Juli 1936 hingga 1 April 1939 yang memakan kurang lebih sebanyak 300.000 hingga 1 juta orang yang terbunuh. Kemenangan berada ditangan Jenderal Franco yang diktaktor. Semenjak naiknya Jenderal Franco, Catalunya merasa tersisihkan, para pemimpinnya disiksa, diinterogasi, dan dieksekusi. Kediktatoran Franco menjadi luka tersendiri untuk masyarakat Catalunya. Kosekuensi lain yang harus diterima kubu yang kalah adalah adanya penyeragaman identitas yang dialami oleh orang-orang Catalan. Perang saudara dan penyeragaman identitas memiliki dampak yang sangat besar terutama untuk Spanyol, karena membutuhkan waktu puluhan tahun untuk melakukan pemulihan. Dampak politik dan emosional ini terasa bahkan sejak kematian Franco ditahun 1975 hingga

sekarang dan inilah yang menyulut kembali semangat masyarakat Catalaonia untuk melepaskan diri untuk menjadi negara yang berdaulat dan memiliki otonomi sendiri (Iskandar, 2017).

Keinginan Catalunya untuk menjadi wilayah yang berdaulat dengan melakukan referendum yang dianggap illegal oleh pemerintah Spanyol mendapatkan penolakan tidak hanya dari pemerintah Spanyol, tetapi juga negara-negara di Eropa. Pemerintah Spanyol selain menyatakan referendum yang dilakukan illegal, Mahkamah Konstitusi Spanyol mendukung pemberhentian Statuta Otonomi wilayah Catalunya dan melakukan perubahan status Catalunya setelah ditemukan pelanggaran prinsip dari supremasi konstitusi Spanyol, kedaulatan nasional, dan persatuan bangsa (Oliveira, 2020).

Mantan Perdana Menteri Spanyol yang saat itu masih bertugas, Mariano Rajoy, membubarkan Parlemen Catalan dan memutuskan untuk melakukan pemilihan baru di wilayah Catalunya. Konflik yang terjadi antara Spanyol dan Catalunya kemudian diwarnai dengan konfrontasi bersenjata dan juga kekerasan pada saat terjadi protes. Sejak awal tahun 2019, unjuk rasa di Catalunya banyak terjadi terhadap proses pengadilan yang dilalui para pemimpin Catalan yang ditangkap setelah terjadinya referendum pada bulan Oktober 2017 yang dilarang oleh pemerintah Spanyol (Taranenko, 2019).

Semakin memanasnya persoalan antara Catalunya dan Spanyol, secara tidak langsung membuat Uni Eropa yang menjadi salah satu institusi yang berpengaruh di Eropa ikut menjadi perhatian. Uni Eropa yang dikenal sebagai supranasional yang memiliki pengaruh besar di Eropa memiliki nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan untuk semua lapisan masyarakat Eropa. Bagi negara-negara anggota, Uni Eropa memiliki posisi penting untuk memutuskan aspek-aspek baik itu ekonomi, politik, social, dan lain-lain. Stephen Kransher, seorang realis

politik berpendapat bahwa Uni Eropa adalah organisasi regional yang terbilang berbeda, unik, dan karakteristiknya tidak dapat ditiru oleh negara lain. Bergabungnya suatu negara ke Uni Eropa dapat diartikan sebagai merelakan sebagian derajat kedaulatan dari negara tersebut karena mereka menyetujui proses pengambilan keputusan konsensus sesuai dengan yang tertulis dalam perjanjian yang menjadi dasar terbentuknya Uni Eropa. Walaupun begitu, terdapat ketidaksetujuan dari beberapa masyarakat Eropa terkait integrasi Uni Eropa dan hal tersebut telah muncul sejak awal, bahkan sejak tahap pertama integrasi di awal tahun 1950an dengan penyatuan segala aspek dalam sistem politik suatu negara. Terdapat anggapan bahwa integrasi yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa hingga terbentuk Uni Eropa, dianggap sebagai pergerakan yang hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok elite dan tidak sepenuhnya merepresentasikan opini publik atau masyarakat Eropa (Azwar, 2016).

Di masa sekarang ini, peristiwa *Britain Exit* (Brexit) juga menjadi salah satu motivasi bagi gerakan-gerakan *secessionist* dalam menciptakan retakan di tubuh Uni Eropa (Ushkovska, 2019). *Secession* sendiri menurut kamus Cambridge merupakan sebuah tindakan untuk menjadi independen dan tidak lagi menjadi bagian dari negara, wilayah, organisasi (Cambridge Dictionary, 2021).

Menurut Lea Brilmayer, seorang Profesor dari Yale Law School, tuntutan *secessionist* tidak dapat dipenuhi hanya dengan adanya reformasi politik di dalam negeri. *Secessionist* cenderung untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan internasional (Brilmayer, 1991). Peningkatan aktivitas gerakan *secessionist* di Eropa, seperti di wilayah Catalunya menjadi salah satu hambatan dan ancaman yang berpengaruh pada integrasi dan keamanan Uni Eropa (Yildirim, 2019).

Terdapat tuntutan yang diberikan masyarakat Catalunya kepada Uni Eropa agar melakukan peran yang

lebih aktif terhadap konflik yang terjadi antara Madrid dan Barcelona. Kritik terhadap Uni Eropa terus datang dari anggota *pro-independence* dan berharap adanya keterlibatan Uni Eropa, orang-orang Catalunya menyatakan bahwa mayoritas dari mereka lebih merasa seperti warga negara Eropa daripada Spanyol dan orang-orang Catalan merupakan warga negara yang dilindungi oleh piagam hak-hak fundamental (Wagner, 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini dapat diajukan sebagai berikut:

Bagaimana sikap yang diambil oleh Uni Eropa terhadap tuntutan gerakan *secessionist* Catalunya tahun 2017-2019?

C. Landasan Teori

Untuk menjelaskan rumusan masalah yang telah disebutkan oleh penulis, maka penulis akan menggunakan Teori Sistem Politik Domestik:

Sistem Politik Domestik menurut David Easton merupakan sebuah aplikasi nilai-nilai terhadap masyarakat yang dalam prosesnya bersifat memaksa dengan kewenangan dan pelaksanaan nilai-nilai tersebut mengikat masyarakat. Dalam proses dari suatu sistem politik, David Easton memberikan empat ciri-ciri utama yang memberikan perbedaan sistem politik dengan sistem-sistem lainnya.

1) Ciri Identifikasi

Identifikasi digunakan untuk membedakan sistem politik dengan sistem lainnya. Pemberian deskripsi unit-unit fundamental dan pemberian batas-batas yang memisahkannya dari unit lain di luar sistem politik. Identifikasi sistem politik yang dikemukakan oleh Easton terdiri dari a) unit-unit dalam sistem politik yang menjadi pembentuk struktur; dan b) Batasan yang akan

mempengaruhi fungsi respon dari sistem politik sesuai dengan keadaan dari lingkungan.

2) *Input dan Output*

Keberadaan *Input* dan *Output* tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi dalam sistem politik. Tidak adanya *input* untuk sistem politik maka sistem politik itu tidak dapat berjalan. Apabila tidak ada output, maka sistem politik tidak dapat mengidefikasi hasil dari sistem politik.

Input terdiri dari tuntutan dan dukungan yang menjadi ide atau pun usulan untuk membentuk sebuah sistem pemerintahan. Input tuntutan atau *demands* adalah alasan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik atau dikarenakan adanya keinginan dari suatu masyarakat yang tidak terpenuhi dan kurang memuaskan dari *output* sebuah sistem politik yang kemudian menghasilkan tuntutan. Easton menjelaskan lebih lanjut mengenai jenis-jenis dari bentuk tuntutan atau *demands* terhadap sistem politik, yaitu: a) *demands for goods and services*, yang akan berupa undang-undang; b) *demands for the regulation of behavior* yang berkaitan dengan keamanan public, pengaturan pasar dan hubungan kerja, serta kebijakan tentang pernikahan dan keluarga; c) *demands for participation in the political*, berkaitan dengan partisipasi dalam sistem politik, hak memilih, menjabat, mengajukan petisi, mengatur asosiasi, dan sejenisnya; d) *symbolic outputs*, bentuk dari tuntutan untuk melihat kekuasaan sistem politik dalam suatu permasalahan yang dapat berbentuk penegasan norma, komunikasi, dan kebijakan dari elit politik.

Sedangkan input dalam bentuk dukungan atau *support* merupakan wujud dari penerimaan *output* atau keputusan dari sistem politik yang berbentuk 1) dukungan material; 2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; 3) partisipasi; 4) menghormati otoritas public, simbol, atau pun upacara.

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa *input* merupakan bentuk respon dari *output* yang merupakan hasil dari keputusan dan tindakan dari sistem politik. Salah satu fungsi dari proses *Input* adalah sebagai artikulasi kepentingan atau sebagai cara untuk menyampaikan kepentingan kepada sebuah sistem politik yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan ataupun kebijakan (Almond, 1974).

Artikulasi kepentingan dilakukan oleh kelompok kepentingan atau lebih dikenal sebagai *interest group*. Kelompok kepentingan menjadi wadah untuk manampung aspirasi kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat yang disusun sedemikian rupa sebelum disampaikan kepada badan sistem politik. Menurut Gabriel A. Almond terdapat beberapa saluran yang digunakan kelompok kepentingan untuk menyampaikan aspirasi, yaitu:

- 1) Demonstrasi dan kekerasan
Demonstrasi digunakan ketika saluran penyampaian aspirasi melalui perwakilan langsung atau konvensional sudah tertutup, sehingga sulit untuk mempengaruhi keputusan. Dalam melakukan demonstrasi perlu dibedakan apabila terdapat Tindakan kekerasan yang dilakukan spontan yang dilakukan oleh kelompok anomik atau kelompok yang kegiatannya hanya bersifat spontan dan sementara.
- 2) Hubungan Pribadi
Strategi ini dilakukan melalui hubungan yang bersifat pribadi seperti hubungan keluarga, asal-usul keluarga, atau hubungan lain yang bersifat kedaerahan.
- 3) Perwakilan Langsung
Penyampaian kepentingan melalui perwakilan langsung di badan legislative atau birokrasi mempermudah penyampaian kepentingan dan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

- 4) Partai Politik
Strategi ini berkaitan dengan fungsi dari partai politik itu sendiri sebagai sarana untuk mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan.
- 5) Media Massa
Media massa dalam melakukan komunikasi kepentingan atau tuntutan dapat berbeda. Di negara-negara demokratis, media massa berperan penting untuk menyalurkan kepentingan atau tuntutan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.
- 6) Badan Legislatif, kabinet, dan birokrasi
Penyaluran kepentingan melalui badan-badan yang langsung berperan dalam pembuatan kebijakan merupakan cara yang cukup diperhitungkan. Hubungan langsung dengan badan birokrasi akan mempermudah menyalurkan kepentingan dan mempengaruhi kebijakan (Almond, 1974).

Selain proses artikulasi kepentingan, terdapat agregasi kepentingan yang juga menjadi salah satu fungsi input. Agregasi kepentingan yang dimaksud adalah proses untuk mengubah atau melakukan konversi tuntutan hingga menjadi kebijakan dengan tahapan-tahapan tertentu. Struktur yang melakukan kegiatan agregasi kepentingan pada umumnya adalah bagian birokrasi dan partai politik. Terdapat tiga jenis style untuk melakukan agregasi kepentingan menurut Almond, yaitu

- a) *Pragmatic-bargaining*
Pada jenis ini, usaha untuk melakukan kompromi dengan mengamati keadaan menjadi poin yang sangat terlihat dalam proses agregasi.
- b) *Absolute-value oriented*
Style ini dicirikan dengan adanya penolakan terhadap kompromi untuk menampung kepentingan atau tuntutan yang lebih beragam dari

masyarakat. Agregasi juga dilakukan secara lebih logis dan teoritis.

c) *Traditionalistic*

Agregasi ini lebih menekankan pada pola yang telah ada atau dilakukan di masa lalu kemudian membuat alternatif kebijakan yang dinilai lebih efektif untuk masa yang akan datang (Almond & Powell Jr, 1966)

Menurut Gabriel A. Almond terdapat empat jenis *output* yang dihasilkan setelah melalui proses dari sistem politik, yaitu: 1) *extractions*, yang berupa upeti, rampasan, pajak, atau pelayanan pribadi; 2) *regulations of behavior*, kebijakan yang akan mempengaruhi sikap dan hubungan kelompok atau pun hubungan manusia; 3) *allocations*, merupakan bentuk distribusi barang, jasa, peluang, penghargaan, status, dan sejenisnya; 4) *symbolic outputs*, berkaitan dengan penegasan nilai-nilai, simbol politik dan pernyataan dan maksud dari kebijakan (Almond, A Developmental Approach to Political Systems, 1965).

3) *Diferensiasi dalam suatu sistem*

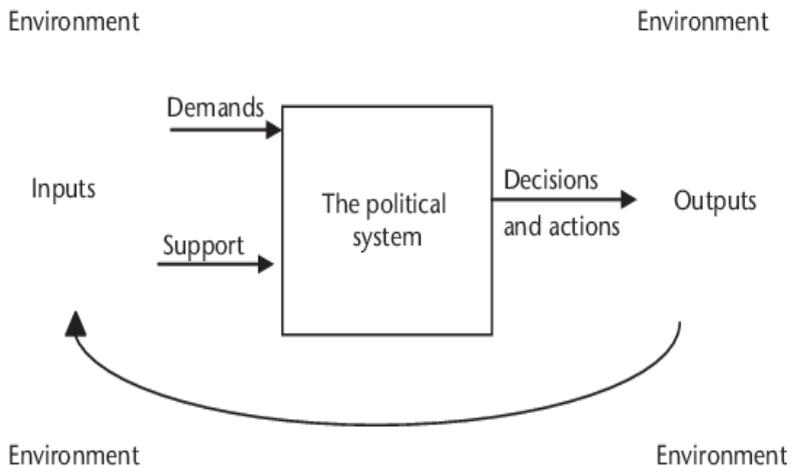
Pada suatu sistem pemerintahan, setiap unit memiliki perbedaan dalam mengerjakan atau melakukan aktivitas dalam waktu yang sama. Hal ini dipahami sebagai pembagian kerja untuk memudahkan aktivitas dalam sistem politik. Lembaga-lembaga legislative, eksekutif, yudikatif, partai politik, dan kelompok kepentingan memiliki peran-perannya sendiri dalam suatu sistem politik. (Easton, An Approach to the Analysis of Political Systems, 1957)

4) *Integrasi suatu sistem*

Kegiatan-kegiatan dari sistem politik yang dilakukan unit-unit yang ada kemudian diintegrasikan agar bekerjasama satu sama lain bahkan dalam kadar yang paling minimal untuk mencapai kepentingan bersama dari

Gambar 1. 1 Skema Sistem Politik David Easton

suatu sistem politik. Dari ciri-ciri utama yang dikemukakan oleh David Easton dan Gabriel A. Almond mengenai sistem politik, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam sistem politik secara umum terdapat *input* yang terdiri dari berbagai macam tuntutan dan dukungan, yang kemudian dikonversi atau diproses pada sistem politik, dan menghasilkan *output* dalam bentuk keputusan atau Tindakan yang nantinya akan diterapkan pada *environment* dan memunculkan *feedback* lainnya. Skema dari sistem politik domestic menurut Easton dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini:



Sumber: (Easton, A System Analysis of Political Life, 1965)

Berdasarkan gambaran dari sistem politik domestic oleh David Easton, penulis akan menjelaskan dinamika interaksi antara gerakan *secessionist* Catalunya dan Uni Eropa, terkait konflik yang terjadi antara Catalunya dan Spanyol.

Pada teori ini digambarkan masyarakat dari anggota Uni Eropa sebagai bagian dari *environment internal* yang akan memberikan *input* berupa tuntutan dan dukungan pada sistem politik Uni Eropa. Catalunya merupakan bagian dari

Spain, and Spain are member states of the European Union. This indicates that the government and the Catalan society are also part of the *environment* of the European Union. As part of the European Union that receives fundamental rights, the *secessionist* movement of Catalonia provides *input* in the form of demands to the European Union. Demands that enter the European Union are requests for the European Union to get involved and become a mediator between Catalonia and Spain. Meanwhile, *input* in the form of support that enters the European Union comes from groups that reject the declaration of Catalonia's independence in the form of confidence in the European Union.

As has been explained in the theory of the Political System, the *secessionist* movement of Catalonia provides *input* or performs a strategy of articulation of interests to the European Union through various ways such as demonstrations, direct representation, mass media, even through legislative bodies. Demands that enter the European Union will be processed through institutions and deliberation, at this stage the European Union performs interest aggregation activities. There are three main institutions that make policy and law that will be implemented by the European Union, namely *European Parliament (EP)*, *Council of the EU*, and *European Commission*. These three institutions receive support from the *European Court of Auditors* which is related to the *budget* used by the EU, then there is the *European Court of Justice* which ensures that every member of the European Union obeys the law that has been established (European Union, 2006).

The process is then converted and will produce *output* in the form of policy, action, and decisions regarding how the European Union will respond to demands from the *secessionist* movement of Catalonia. *Output* that is issued by the European Union will also have an impact on how the European Union deals with

masalah yang berkaitan dengan anggota Uni Eropa dan juga akan mempengaruhi hubungan antara Uni Eropa, gerakan *secessionist* Catalunya, dan pemerintahan Spanyol. *Environment* yang mendapatkan *output* akan memiliki pilihan untuk menerima atau menolak kebijakan tersebut, sehingga akan terbentuk *feedback* yang akan disalurkan Kembali kepada Uni Eropa.

D. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diberikan, penulis memberikan hipotesa: Uni Eropa menolak tuntutan yang diberikan oleh gerakan *secessionist* Catalunya sebagai bentuk realisasi untuk menghargai konstitusi dan menjaga keutuhan integrasi dari negara anggotanya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian dengan rumusan masalah “Bagaimana sikap yang diambil oleh Uni Eropa terhadap tuntutan gerakan *secessionist* Catalunya tahun 2017-2019?” untuk:

1. Penelitian ini dapat menjadi informasi baru yang bermanfaat serta menambah wawasan untuk penelitian lain yang mengenai gerakan *secessionist* di Catalunya atau pun di wilayah Eropa lainnya.
2. Dapat menjadi informasi untuk penelitian lain mengenai sistem politik dan pengambilan keputusan di Uni Eropa dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada anggota Uni Eropa.

F. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan skripsi ini lebih efektif, maka penulis akan memberi batasan jangkauan penelitian agar pembahasan tidak meluas. Jangkauan penelitian yang diambil meliputi gerakan *secessionist* Catalunya dan respon Uni Eropa dalam menghadapi gerakan *secessionist* di Catalunya pada tahun 2017-2019.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian eksplanatif dimana akan dilakukan penjelasan secara menyeluruh mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan rumusan masalah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah metode pengumpulan data sekunder atau teknik pengumpulan data melalui media cetak seperti dokumen, referensi, buku, dan melalui media internet seperti jurnal online, berita online atau e-book. Untuk teknik Analisa dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis data secara kualitatif, analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan di bab selanjutnya, penulis akan membagi pembahasan menjadi beberapa bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: membahas mengenai pergerakan munculnya gerakan *secessionist* Catalunya

BAB III: berisi uraian tentang analisis terkait bentuk input dan respon yang diberikan Uni Eropa terhadap gerakan *secessionist* Catalunya.

BAB IV: berisi kesimpulan yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan secara keseluruhan yang berkaitan dengan respon Uni Eropa terhadap gerakan *secessionist* Catalunya.